

**PELUANG PENINGKATAN PERANAN HUTAN PRODUKSI KPH  
RANDUBLATUNG TERHADAP PENINGKATAN KONDISI  
SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT SEKITAR  
(Studi Kasus: Kecamatan Randublatung)**

**TUGAS AKHIR**

Oleh:

**MEILYA AYU S  
L2D 001 441**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2005**

## ABSTRAK

Kabupaten Blora memiliki kawasan hutan produksi cukup luas sebesar 46,7% (90.416 Ha), yang terbagi menjadi tiga Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), yaitu KPH Cepu, KPH Randublatung dan KPH Blora. Meskipun keberadaan hutan di Kabupaten Blora mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan daerah sebanyak 8,7 milyar (33,8%), namun kondisi yang serupa belum dapat dicapai oleh masyarakat sekitar hutan. KPH Randublatung yang kawasannya paling luas memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya jumlah keluarga pra sejahtera di kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah KPH Randublatung sebanyak 63,94%. Salah satunya adalah Kecamatan Randublatung yang sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan hutan KPH Randublatung. Adanya kesenjangan ekonomi antara ketersediaan sumberdaya hutan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat memerlukan upaya penanganan yang tidak mudah karena melibatkan kepentingan dan peran serta banyak pihak. Terkait dengan langkah awal yang dapat dilakukan, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi peluang aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan di sekitar hutan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peranan dan potensi ekonomi hutan produksi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Penelitian ini menggunakan gabungan antara metode penelitian survei dan metode penelitian kualitatif. Dimana sebagian besar data yang dibutuhkan dalam analisis diperoleh dari hasil survei langsung di lapangan, yaitu hasil kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil survei tidak langsung, seperti dokumen instansi dan publikasi media digunakan sebagai data pendukung. Dalam penyebaran kuesioner ke masyarakat, teknik sampling yang digunakan yaitu simple random sampling yang memberikan kesempatan sama kepada setiap elemen dalam populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik analisis dalam mengolah data untuk mencapai tujuan penelitian antara lain analisis kualitatif deskriptif dan analisis kualitatif komparatif. Analisis dalam penelitian terdiri dari analisis keterkaitan aktivitas ekonomi masyarakat dengan sektor kehutanan, analisis peranan hutan produksi berdasarkan persepsi dan kebijakan pemerintah, analisis kebutuhan dan potensi sumberdaya masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang terkait dengan sektor kehutanan, analisis potensi peningkatan peranan hutan produksi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan rekomendasi pengembangan peranan hutan produksi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.

Penelitian ini memperlihatkan kegiatan ekonomi masyarakat yang memiliki peluang dikembangkan maupun dimunculkan serta upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peranan hutan produksi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Dari hasil analisis, kegiatan ekonomi yang dapat dikembangkan, yaitu (1) dari pemanfaatan kawasan hutan: pertanian tumpang sari, pertanian monokultur, koperasi Saprotan (Sarana Produksi Pertanian), pemeliharaan kambing dan sapi dengan sistem kereman (dikandang), dan penyediaan petak hutan untuk hijauan makanan ternak. (2) dari pemanfaatan hasil kayu: jual beli kayu, industri penggergajian dan pembuatan arang, kerajinan mebel dan ukiran, pengepul kayu bakar, buruh angkut, jasa pengangkutan (penyewaan kendaraan dan sopir carteran), tenaga penggali kayu pendem dan koperasi simpan pinjam dan kontrak kerjasama dengan PT. Perhutani sebagai tenaga kehutanan. (3) dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu: penjualan daun jati, daun plosor, bibit jati, gelam, ungker. Untuk peluang kegiatan ekonomi yang dapat dimunculkan, yaitu (1) dari pemanfaatan kawasan hutan: pengadaan bibit jagung, pembuatan pupuk bokasi, pemungutan dan budidaya empon-empon, budidaya tanaman porang, penggemukan kambing dan sapi dengan sistem kereman (dikandang). (2) dari pemanfaatan hasil kayu: alat rumah tangga. (3) pemanfaatan hasil hutan bukan kayu: kerajinan barang rumah tangga dari bambu dan daun pandan.

*Kata kunci: peluang, peran hutan produksi, peningkatan sosial ekonomi, Randublatung*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kabupaten Blora merupakan suatu wilayah yang memiliki sumberdaya hutan cukup luas, yaitu sebesar 46,7% (90.416 hektar) dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Blora yang mencapai 182.000 hektar (BPS Kabupaten Blora, 2003). Hutan Blora mayoritas ditumbuhi kayu jati dimana sekitar 82.000 hektar kawasan hutan ini dikelola oleh PT. Perhutani Unit I Jawa Tengah yang meliputi enam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan sisanya merupakan hutan rakyat yang hasil produksinya diolah oleh industri penggergajian dan mebel skala kecil di daerah Kabupaten Blora sendiri (Kompas, 2003). Jumlah industri pengolahan kayu jati masih sedikit karena tebangan kayu jati dari Perhutani dipasarkan ke daerah lain, dan belum terampilnya penduduk dalam mengolah kayu jati menjadi mebel dan ukiran (Kompas, 2003).

Penduduk Kabupaten Blora memandang hutan sebagai kekayaan daerah yang seharusnya bisa lebih menjamin kehidupan ekonomi mereka sehari-hari (Kompas, 2003). Seperti yang disebutkan dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mewakili kepentingan ekonomi kesejahteraan masyarakat dari seluruh pengaturan tentang fungsi hutan sebagai aset ekonomi, yaitu pemanfaatan hutan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Hal ini sesuai dengan motto Cacana Jaya Kerta Bhumi yang berarti bumi Blora mengandung kejayaan dan kemakmuran yang langgeng (Kompas, 2003).

Hutan Kabupaten Blora merupakan hutan jati produksi yang selama ini dikenal sebagai produsen kayu jati kualitas terbaik di Indonesia, terutama kawasan hutan jati yang dikelola PT. Perhutani Unit I Jawa Tengah (BPS Kabupaten Blora, 2003). Selama ini produksi kayu jati memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tiga KPH, yaitu KPH Cepu, KPH Randublatung, dan KPH Blora (BPS Kabupaten Blora, 2003).

Dari ketiga KPH tersebut, pada tahun 2002 Perhutani menyumbang dana ke pendapatan daerah Rp 5,2 milyar melalui pajak bumi dan bangunan, dan Rp 2,3 milyar melalui sumberdaya hutan (Kompas, 2003). Sementara dari hutan rakyat oleh Kantor Kehutanan setempat menyumbang Rp 1,2 milyar dari retribusi ijin pengambilan hasil hutan termasuk perangkutan (Kompas, 2003). Total sumbangan sektor kehutanan terhadap PAD Rp 8,7 milyar atau 33,8% dari PAD (Kompas, 2003).

Meskipun keberadaan hutan di Kabupaten Blora mampu memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan daerah, namun kondisi yang serupa belum dapat dicapai oleh masyarakat sekitar hutan. KPH Randublatung yang kewasannya paling luas (32.464,1 hektar atau 35,91%) di Kabupaten Blora memiliki tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah (RPKH KPH Randublatung 2003-2012). Sebanyak 63,94% keluarga di kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah KPH Randublatung yang terdiri dari enam kecamatan yaitu Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kradenan, Kecamatan Jepon, Kecamatan Banjarejo dan Kecamatan Kunduran, masih berada pada tahapan keluarga pra sejahtera baik karena alasan ekonomi maupun bukan alasan ekonomi (BKKBN Kabupaten Blora, 2005).

Di Kecamatan Randublatung, jumlah penduduk pra sejahtera sebanyak 47,36%. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak 83,58% dari jumlah tenaga kerja yang ada, baik sebagai petani maupun buruh tani, sebagian besar dari mereka adalah pesanggem atau petani hutan. Salah satu faktor yang mempengaruhi banyaknya jumlah pesanggem adalah 65,69% wilayah Kecamatan Randublatung merupakan kawasan hutan produksi (Kecamatan Randublatung, 2003).

Sebagai sektor yang memiliki persentase besar dalam memberi masukan dana bagi pemerintah, diharapkan hutan produksi KPH Randublatung tidak hanya mampu memenuhi permintaan industri pengolahan kayu, tetapi juga mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan pelaksanaan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) mulai tahun 2002 di KPH Randublatung yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat (Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001).

Terdapatnya permukiman penduduk di dalam dan di sekitar kawasan hutan produksi KPH Randublatung dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 409 jiwa/Km<sup>2</sup> (BPS Kabupaten Blora, 2003), menjadi salah satu faktor kedekatan masyarakat dengan hutan. Interaksi langsung masyarakat terhadap kawasan hutan dan tingkat ketergantungan hidup yang tinggi terhadap sumberdaya hutan, mempengaruhi tingginya fungsi hutan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari maupun sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat di sekitarnya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sumberdaya hutan harus diperhatikan karena terabaikannya kebutuhan masyarakat bisa memicu terjadinya penjarahan hutan, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1997-2001 di KPH Randublatung.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa pembangunan sektor kehutanan memiliki peran yang cukup penting di Kabupaten Blora. Hal tersebut diperlihatkan oleh beberapa poin sebagai berikut: pertama, luas hutan produksi Kabupaten Blora mencapai 46,7% dari luas wilayah keseluruhan

Kabupaten Blora dengan KPH Randublatung sebagai KPH terluas sebesar 35,91%. Kedua, besarnya sumbangan sektor kehutanan terhadap PAD Kabupaten Blora sebesar 33,8%. Ketiga, sebanyak 63,94% masyarakat sekitar kawasan KPH Randublatung merupakan keluarga pra sejahtera. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan potensi pengembangan sektor kehutanan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, maka studi mengenai peluang peningkatan peranan hutan produksi Kabupaten Blora terhadap sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan penting dilakukan. Studi ini untuk mengetahui aktivitas ekonomi yang bisa dikembangkan oleh masyarakat dan LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) melalui pemanfaatan sumberdaya hutan produksi KPH Randublatung yang memiliki daya dukung potensi sumberdaya masyarakat, dalam rangka meningkatkan peranan hutan produksi terhadap peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan. Serta upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh masyarakat desa hutan, PT. Perhutani, LSM, LMDH dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan peranan hutan produksi KPH Randublatung tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adanya kesenjangan ekonomi antara ketersediaan sumberdaya hutan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya menjadi permasalahan penting yang dihadapi oleh daerah-daerah sekitar hutan di Kabupaten Blora khususnya KPH Randublatung karena menyangkut berbagai aspek kehidupan antara lain aspek keadilan dan lingkungan. Meskipun sumberdaya hutan memberikan hasil yang cukup tinggi bagi Kabupaten Blora namun masyarakat di sekitarnya belum dapat merasakan manfaat ekonomi dari hasil pengelolaan sumberdaya hutan tersebut karena sebagian besar dikirim ke pusat (Sugiri, 2000). Selain itu, keuntungan yang seharusnya bisa diperoleh masyarakat justru lepas karena direbut oleh pedagang dan industrialis yang memiliki modal besar (Ardana, 2002). Sebagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan kawasan hutan, masyarakat desa hutan lebih banyak terpengaruh oleh kerusakan ekosistem hutan seperti tanah tandus dan banjir sebagai akibat adanya erosi tanah. Bila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa hutan yang miskin dan memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumberdaya hutan dapat memicu terjadinya penjarahan hutan seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Blora pada tahun 1997-2002.

Dari uraian permasalahan di atas, penting dilakukan upaya-upaya yang mampu meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan turut serta memanfaatkan ketersediaan sumberdaya alam setempat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemanfaatan sosial ekonomi dari sumberdaya alam terhadap masyarakat setempat agar masyarakat ikut berperan dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam tersebut. Salah satu pertanyaan penelitian yang perlu dijawab untuk meningkatkan kualitas atau kondisi sosial ekonomi masyarakat lingkungan hutan di KPH